

ISU *BORDERLESS* DAN *DUAL NATIONALITIES*: Pemicu Disintegrasi Bangsa di Perbatasan Indonesia-Timor Leste

Yohanis Kristianus Tampani

tampanijohn@gmail.com

Pendidikan Sejarah, STKIP Sinar Pancasila

Alamat: Jln. Bakateu No.9 Betun, Wehali, Kec. Malaka Tengah, Kab. Malaka, Nusa Tenggara Timur. Telepon: 0813-3876-7126

Abstract

Borderless and Dual Nationalities Issues: Triggers of national disintegration on the Indonesia-Timor Leste border. The method in this study is a qualitative approach with a library study method, namely collecting or studying documents on sources and related literature in this study. The results of this study indicate that the Borderless Issue is a situation in which existing boundaries in a society are increasingly fading. There are no boundaries that govern a person's behavior in acting and assessing an action. If the infrastructure is adequate, then communication becomes difficult and will not be created and the attention given by the Government can sometimes also cause problems that occur in border areas. The government is more active in emphasizing its programs only in certain areas, this often creates social jealousy from other areas that have not been reached by the government's programs. From there, the seeds of conflict began to emerge, even if the conflict or problem is not immediately resolved, it will create a big threat and even endanger the integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI). On the other hand, many citizens of East Timor still hold passports of the Republic of Indonesia (RI) who legally still have the status of Indonesian citizens who are de facto citizens of East Timor but de jure are Indonesian citizens (passive Indonesian citizens) so that it can be concluded There are three categories of nationality, namely dual nationalities, stateless and passive citizenship. The role of learning history as an effort to instill nationalist values is to warn us about the importance of understanding our national identity by looking back at the time when this identity was formed.

Keywords: *Learning History, Borderless Issues, Dual Nationalities*

Abstrak

Isu Borderless dan Dual Nationalities : Pemicu disintegrasi bangsa di perbatasan Indonesia-Timor Leste. Metode dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan yakni mengumpulkan atau melakukan studi dokumen terhadap sumber dan literatur-literatur yang terkait dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Isu Borderless merupakan suatu keadaan di mana batas-batas yang ada dalam suatu masyarakat kian memudar. Tak ada batasan-batasan yang mengatur perilaku-perilaku seseorang dalam bertindak dan menilai sebuah tindakan. Infrastruktur yang memadai, maka komunikasi

menjadi sulit dan tidak akan tercipta dan perhatian yang diberikan oleh Pemerintah, kadangkala juga bisa membuat permasalahan yang terjadi di daerah perbatasan. Pemerintah lebih giat dalam menekankan program-programnya hanya pada wilayah tertentu hal tersebut sering menimbulkan kecemburuan sosial dari wilayah-wilayah lain yang belum terjangkau program dari pemerintah tersebut. Dari situlah, bibit-bibit konflik mulai muncul, bahkan jika konflik atau masalah tersebut tidak segera ditanggulangi, akan menjadikan suatu ancaman yang besar, dan justru membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Di lain pihak banyak warga masyarakat Timor-Timur yang masih memegang paspor Republik Indonesia (RI) yang secara hukum masih berstatus WNI yang secara de facto merupakan warga negara Timor-Timur tapi secara de jure merupakan warga negara Indonesia (warga Indonesia pasif) sehingga dapat disimpulkan terdapatnya tiga kategori kewarganegaraan yakni kewarganegaraan ganda (dual nationalities), tanpa kewarganegaraan, dan kewarganegaraan pasif. Peran pembelajaran sejarah sebagai upaya menanamkan nilai-nilai nasionalisme untuk memberi peringatan kepada kita tentang pentingnya memahami identitas kebangsaan yang kita miliki dengan cara menengok kembali kepada masa lalu waktu identitas tersebut terbentuk.

Kata kunci : Pembelajaran Sejarah, Isu Borderless, Dual Nationalities

Pendahuluan

Krisis finansial Asia pada pengujung abad-20 menyebabkan ekonomi Indonesia melemah. Semakin besar ketidakpuasan masyarakat terhadap sistim pemerintahan pimpinan Soeharto saat itu menyebabkan terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh berbagai organisasi mahasiswa di Indonesia yang ditandai dengan reformasi. Pemerintah orde baru dinilai tidak mampu menciptakan kehidupan masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Lahirnya reformasi adalah memperbaiki tatanan perikehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pemerintah orde baru yang dipimpin Presiden Soeharto selama 32 tahun ternyata tidak konsisten dan konsekuen dalam melaksanakan cita-cita orde baru. Pada awal kelahirannya tahun 1966, orde baru bertekad untuk menata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara namun dalam pelaksanaannya masih menyimpang dari nilai-nilai pancasila dan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam UUD 1945 yang sangat merugikan masyarakat kecil. Bahkan Pancasila dan UUD 1945 hanya dijadikan legitimasi untuk mempertahankan kekuasaan. Penyimpangan-penyimpangan tersebut melahirkan krisis multidimensional yang menjadi penyebab umum lahirnya gerakan reformasi. Salah satunya adalah masalah Timor Timur yang menyita perhatian dunia internasional.

Pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto akhirnya menyampaikan pengunduran dirinya dan melantik wakil Presiden B. J. Habibie sebagai Presiden RI dihadapan pimpinan MA. Peristiwa ini disambut baik oleh masyarakat terutama para mahasiswa yang telah menduduki gedung MPR dan DPR. Rezim orde baru akhirnya runtuh dan era reformasi dimulai di bawah pemerintahan B. J. Habibie sebagai presiden ke- 3 Republik Indonesia. Dengan momentum reformasi itu, persoalan status Timor-Timur yang sudah ada pada masa pemerintahan Soeharto menarik perhatian PBB dan masyarakat internasional diharapkan memperoleh kejelasan. Tetapi pada akhirnya masalah Timor-Timur akhirnya lepas dari wilayah NKRI.

Tidak terpenuhinya hak-hak dasar rakyat seperti kesejahteraan, keadilan, kesehatan, pendidikan, dan sarana transportasi akhirnya membuat rakyat Timor-Timur lebih tertarik dengan ide kemerdekaan. Lemahnya kesadaran politik masyarakat dan ide-ide disintegrasi yang dimainkan oleh pihak asing gampang diterima masyarakat padahal disintegrasi merupakan alat permainan negara-negara kapitalis terjajah. Yang diuntungkan dari disintegrasi adalah negara-negara penjajah. Karena itu meminta bantuan kepada negara-negara kapitalis penjajah sesungguhnya bukan solusi tetapi justru akan menimbulkan penderitaan baru antara masyarakat Timor-Timur, Pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Munculnya tekanan-tekanan dari masyarakat internasional menanggapi kasus-kasus yang terjadi di Timor-Timur itu memaksa Indonesia untuk mengeluarkan kebijakan agar mengakui hak menentukan nasib sendiri (*right of self determination*) kepada Timor-Timur guna mengakomodasi aspirasi masyarakat Timor-Timur. Demi merajut keutuhan wilayah NKRI, Presiden Habibie memberikan beberapa upaya dalam rangka mempertahankan Timor-Timur antara lain: 1) memberikan otonomi luas kepada Timor-Timur; 2) memberikan kebebasan berupa jajak pendapat bagi masyarakat Timor-Timur untuk memilih tetap menjadi bagian Indonesia ataukah memisahkan diri dan merdeka; 3) kebijakan presiden Habibie dengan memberikan opsi referendum untuk mencapai solusi final atas masalah Timor-Timur. Usulan Indonesia itu disampaikan kepada sekjen PBB.

Sebagai tindak lanjutnya, PBB mengadakan pembicaraan segitiga antara Indonesia, Portugal (karena Timor-Timur di bawah kekuasaan Portugal), dan PBB. Namun selama pembicaraan itu, masih terjadi kerusuhan antara pihak pro kemerdekaan dan pro integrasi di

Timor-Timur. Akibatnya, Indonesia semakin mendapat kecaman dari masyarakat internasional khususnya negara-negara Barat yang merupakan sasaran utama *speech act* dalam usaha sekuritisasi kasus Timor-Timur.

Berangkat dari pembicaraan tiga pihak serta kecaman yang semakin keras dari dunia internasional, akhirnya Indonesia memutuskan untuk melaksanakan jajak pendapat pada tahun 1999. Jajak pendapat berakhir dengan kemenangan di pihak pro kemerdekaan Timor-Timur. Dengan kemenangan tersebut, Timor-Timur akhirnya meraih kedaulatan sebagai sebuah negara merdeka.

Metode Penulisan

Metode penulisan dalam penelitian ini yakni melalui pendekatan kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan metode studi kepustakaan dengan mengumpulkan sumber literatur yang terkait dalam penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

A. Isu *Borderless* Sebagai Pemicu Disintegrasi Bangsa

Isu *Borderless* merupakan suatu keadaan di mana batas-batas yang ada dalam suatu masyarakat kian memudar. Tak ada batasan-batasan yang mengatur perilaku-perilaku seseorang dalam bertindak dan menilai sebuah tindakan. Alasan yang memperkuat bahwa globalisasi dapat dikatakan sebagai *Borderless* karena dalam pelaksanaannya globalisasi mampu menghilangkan batasan otoritas sebuah negara. Ketika sebuah negara masuk dalam persaingan globalisasi maka intervensi terhadap eksistensi kedaulatan ekonomi, teknologi, dan hal-hal global lainnya sangat mungkin terjadi.

Saat ini dengan adanya globalisasi masyarakat di dunia sudah sangat mudah mengakses, mengetahui, dan memahami aktifitas-aktifitas masyarakat dunia. Dengan kemudahan tersebut, kadang kala masyarakat dapat terlena dan melupakan batasan-batasan moral budaya dalam negaranya sendiri. Kurangnya infrastruktur yang memadai, maka komunikasi menjadi sulit dan tidak akan tercipta atau terjalin dengan baik. Terlebih, jika kita memperhatikan daerah-daerah yang berada di perbatasan, di mana daerah tersebut biasanya

didominasi oleh suku-suku asli, dalam arti lain sedikit tertinggal dalam masalah teknologi informasi sehingga, untuk bisa terjalin komunikasi dan hubungan yang baik antar sesama, antar pulau, maka perlunya diciptakan infrastruktur yang memadai dan perhatian yang harus diberikan secara lebih intensif kepada wilayah terkait yang memiliki masalah tersebut. Kurangnya perhatian yang diberikan oleh Pemerintah, kadangkala juga bisa membuat permasalahan yang terjadi di daerah perbatasan. Seperti contohnya, Pemerintah lebih giat dalam menekankan program-programnya hanya pada wilayah tertentu, atau wilayah yang hanya terjangkau oleh mereka saja. Ini menimbulkan kecemburuan sosial dari wilayah-wilayah lain yang belum terjangkau program dari pemerintah tersebut. Dari situlah, bibit-bibit konflik mulai muncul, bahkan jika konflik atau masalah tersebut tidak segera ditanggulangi, akan menjadikan suatu ancaman yang besar, dan justru membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

B. Munculnya *Dual Nationalities* di Perbatasan Indonesia-Timor Leste

Permasalahan pelik yang masih sering kita jumpai di daerah perbatasan adalah identitas sosial masyarakat. Salah satunya adalah berkewarganegaraan ganda (*dual nationalities*). Masalah kewarganegaraan menjadi isu utama dalam berbagai isu residual kedua negara. Belum diatur secara tegas status kewarganegaraan penduduk maka timbul ketidakpastian hukum terkait dengan kewajiban dan hak di masing-masing negara.

Masalah kewarganegaraan di perbatasan Indonesia-Timor Leste menjadi rujukan terhadap masalah yang sama dewasa ini berdasarkan undang-undang yang baru pada kedua negara. Menurut Wahyono (2009: 11) menjelaskan bahwa, aturan mengenai status kewarganegaraan Timor-Timur saat itu ditetapkan dalam konstitusinya yang juga masih dalam pembahasan, namun pada prinsipnya akan menerapkan azas tempat kelahiran (*ius soli*) dan sekaligus juga menerapkan azas hubungan kekeluargaan/darah (*ius sanguinis*) di samping kewarganegaraan yang didapat dengan cara perolehan yang dalam praktek/ kebiasaan internasional diperoleh melalui proses registrasi dan/ atau naturalisasi.

Sementara itu pada tanggal 6 Oktober 2002 Parlemen Nasional Timor Leste telah menetapkan Undang-Undang Kewarganegaraan. Walaupun Undang-Undang Kewarganegaraan dan garis besar Konstitusi Timor Leste telah merumuskan siapa-siapa yang

menjadi warga negara Timor Leste namun masalah status kewarganegaraan ini belum berjalan efektif. Kemudian tidak tertampungnya hak-hak dari orang asing (terutama Indonesia) untuk menjadi warga negara Timor Leste berdasarkan hak politik, sosial, dan ekonomi secara tradisional berada di wilayah Timor tentu akan berakibat pada konflik dan disintegrasi bangsa.

Di lain pihak banyak warga masyarakat Timor-Timur yang masih memegang paspor Republik Indonesia (RI) yang secara hukum berarti masih berstatus WNI yang secara *de facto* merupakan warga negara Timor-Timur tapi secara *de jure* merupakan warga negara Indonesia (warga Indonesia pasif) sehingga dapat disimpulkan terdapatnya tiga kategori kewarganegaraan yakni kewarganegaraan ganda (*dual nationalities*), tanpa kewarganegaraan, dan kewarganegaraan pasif. Berangkat dari permasalahan di atas, tentu akan sangat berimbas pada identitas kebangsaan dan nasionalisme warga negara di perbatasan.

C. Membangun sikap Nasionalisme di perbatasan

Mengenai konsep nasionalisme Indonesia seiring berjalannya waktu terdapat penyesuaian-penyesuaian. Sebagaimana Sudarsono (2011: vii) mengatakan bahwa, nasionalisme pada konsep klasik masih didasarkan pada rasa cinta tanah air. Konsep klasik masih berkembang pada kelompok bawah yang ada di pelosok-pelosok. Sedangkan secara konsep modern, pada kelompok menengah atas, nasionalisme didasarkan pada kecintaan tanah air (*land and territory*) yang dihubungkan dengan nasionalisme fungsional, nasionalisme berdasarkan profesi. Dengan usia kemerdekaan yang demikian panjang, nasionalisme Indonesia menjadi modal penggerak menuju kemerdekaan yang hingga hari ini belum juga sepenuhnya terbangun dengan kokoh.

Hal mendasar dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah yang berimplikasi pada pemekaran wilayah tampaknya mengenai persoalan identitas. Menurut Zuhdi, (2017: 17) mengatakan bahwa, identitas biasanya muncul atau dimunculkan untuk membedakan “kita” dan “mereka”. Setiap nasionalitas (kebangsaan) dan etnisitas (*ethnicity*) selalu memiliki identitas atau jati diri.

Sehubungan dengan itu, Benedict Anderson menekankan tentang pentingnya nasionalisme bagi bangsa Indonesia dalam pengertian tradisional. Untuk itu Anderson

menganjurkan pentingnya menumbuhkan kembali semangat nasionalis sebagaimana yang dulu hidup secara nyata di kalangan para pejuang pergerakan dan revolusi. Ia mengusulkan dibinanya semangat nasionalisme kerakyatan yang sifatnya bukan elitis melainkan memihak kepada masyarakat luas khususnya rakyat yang lemah dan terpinggirkan (Grosby, 2011: 214-215).

Melemahnya sikap nasionalisme di kalangan warga akibat kemiskinan dan kurangnya perhatian pemerintah pusat berdampak serius pada ranah demografi dan status kewarganegaraan (*citizenship*). Mengutip berita harian Kompas tertanggal 3 Juni 2010 yang disampaikan Riwanto Tirtosudarno mengatakan bahwa sekitar 2000 warga kabupaten Sanggau dan kabupaten Bengkayang yang tinggal di perbatasan Kalimantan Barat – Serawak, Malaysia memilih berganti kewarganegaraan menjadi warga negara Malaysia. Perpindahan kewarganegaraan yang diawali dengan tindakan warga bermigrasi ke Serawak, Malaysia guna mencari peruntungan dan penghidupan yang layak.

Terkait dengan melemahnya sikap nasionalisme, pendidikan sejarah memiliki peran yang sangat penting dalam menumbuhkembangkan/menanamkan nilai-nilai/ sikap nasionalisme. Sehingga proses globalisasi sebagaimana diungkapkan oleh Antony Giddens ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mampu mengikis rasa nasionalisme dapat dicegah dengan menanamkan nilai-nilai nasionalisme sejak dini melalui pembelajaran sejarah. Hal ini senada diungkapkan oleh Hamid Hasan (dalam Historia, 2012: 54) bahwa, salah satu konten atau isi dari pendidikan sejarah adalah menunjukkan nilai-nilai kepahlawanan, keteladanan, revolusioner, patriotik, dan nasionalisme.

Peran pembelajaran sejarah sebagai media untuk menanamkan nilai-nilai nasionalisme. Dalam konteks nasionalisme, sejarah memberi peringatan kepada kita tentang pentingnya memahami identitas kebangsaan yang kita miliki dengan cara menengok kembali kepada masa lalu waktu identitas tersebut terbentuk.

Kesimpulan

Isu *Borderless* merupakan suatu keadaan di mana batas-batas yang ada dalam suatu masyarakat kian memudar. Tak ada batasan-batasan yang mengatur perilaku-perilaku seseorang dalam bertindak dan menilai sebuah tindakan. Isu yang paling mencuat adalah

munculnya kewarganegaraan ganda (*dual nationalities*) yang tentu akan berpengaruh pada identitas dan jati diri warga negara. Hal ini akan sangat rentan terjadi konflik antar warga di perbatasan.

Untuk mengatasi hal tersebut, pendidikan sejarah memiliki peran yang sangat penting dalam menumbuhkembangkan/ menanamkan nilai-nilai/ sikap nasionalisme. Sehingga proses globalisasi sebagaimana diungkapkan oleh Antony Giddens ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mampu mengikis rasa nasionalisme dapat dicegah dengan menanamkan nilai-nilai nasionalisme sejak dini melalui pembelajaran sejarah.

DAFTAR PUSTAKA

Zuhdi, Susanto. 2017. *INTEGRASI BANGSA DALAM BINGKAI KEINDONESIAAN*. Jakarta : Wedatama Widya Sastra.

Grosby, Steven. 2011. *Sejarah Nasionalisme; Asal Usul Bangsa dan Tanah Air*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Wahyono, Kristio. 2009. *Sepuluh Tahun Tragedi Timtim: Timor Target*. Aceh : Krueng Aceh